

STRATEGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENUTUP PRAKTIK PROSTITUSI DI LOKALISASI DOLLY

Khoirotun Nisak

15040254007 (PPKn, FISH, UNESA) nisasan342@gmail.com

I Made Suwanda

0009075708 (PPKn, FISH, UNESA) madesuwanda@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pemerintah kota Surabaya dalam menutup praktik prostitusi di lokalisasi Dolly dan kendala yang dihadapi pemerintah kota Surabaya dalam menutup praktik prostitusi di Lokalisasi Dolly. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga tahap strategi pemerintah kota Surabaya dalam menutup lokalisasi Dolly yaitu: (1) upaya penutupan lokalisasi terbagi menjadi tiga kegiatan yakni deklarasi dukungan penutupan lokalisasi Dolly, pendataan paraWTS dan warga terdampak, pembelian wisma. Tahap (2) pelaksanaan penutupan lokalisasi terbagi menjadi dua kegiatan yakni deklarasi penutupan dan pemulangan serta pemberian pesangon bagi WTS dan mucikari yang tidak asli warga kota Surabaya. Tahap (3) yaitu upaya pasca penutupan lokalisasi terbagi menjadi dua kegiatan yakni patroli keliling dan progam rehabilitasi, dalam progam rehabilitasi ini terbagi lagi menjadi tiga kegiatannya diantaranya pembinaan spritual, pelatihan ketrampilan dan alih pekerjaan. Kendala yang dihadapi pemerintah kota Surabaya dalam menutup praktik prostitusi di Lokalisasi Dolly adalah adanya ancaman wali kota Surabaya dibunuh dan banyaknya wisma di lokalisasi Dolly milik warga pendatang.

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Kota Surabaya, Dolly

Abstract

The purpose of this study is to describe the strategy of the Surabaya city government in closing the practice of prostitution in Dolly's brothel and the obstacles faced by the Surabaya city government in closing the practice of prostitution in Dolly's brothel. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The data collection techniques used were in-depth interviews and documentation. While the validity of the data used is source triangulation. These results showed that there were three stages of the strategy of the Surabaya city government in closing Dolly's localization, namely: (1) efforts to close the localization were divided into three activities, namely the declaration of support for the closure of Dolly's localization, data collection on paraWTS and affected residents, purchase of guesthouses. Stage (2) the implementation of the closure of the lokalisasi is divided into two activities, namely the declaration of closure and return and the provision of severance pay for prostitutes and pimps who are not native residents of Surabaya. Stage (3), namely the post-closure efforts of the localization are divided into two activities, namely mobile patrols and rehabilitation programs, in this rehabilitation program it is further divided into three activities including spiritual guidance, skills training and professional transfer. The obstacles faced by the Surabaya city government in closing the practice of prostitution in Dolly brothel are the threat of the mayor of Surabaya being killed and the large number of guesthouses in Dolly's lokalisasi belonging to immigrants.

Keywords: Strategy, Surabaya City Government, Dolly

PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan Kota Pahlawan, Kota Perdagangan dan Jasa. Kota Surabaya juga menjadi tempat bisnis yang utama di Indonesia Timur. Kota ini mendapat sebutan kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Yang memiliki lokalisasi terbesar di Indonesia yang menjadikan salah satu kota yang terkenal pula dengan adanya lokalisasi. Masalah sosial ini biasanya

lahir dari kondisi keadaan masyarakat yang tidak ideal. Masalah sosial biasanya muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. (Karsidi, 2005:37).

Keberadaan kota Surabaya sebagai kota metropolis menarik bagi masyarakat yang berasal dari kota-kota di sekitar Kota Surabaya untuk urbanisasi di Surabaya. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab permasalahan sosial yang ada di kota Surabaya yakni WTS yang ditandai dengan banyaknya lokalisasi yang bertebaran di kota Surabaya baik legal maupun ilegal. Salah satu lokalisasi terbesar di Surabaya dan bersifat legal adalah Lokalisasi Dolly. Lokalisasi ini menyediakan berbagai macam pekerjaan yang menjadikan kawasan Dolly sebagai ladang penghasilan bagi mereka.

Prostitusi merupakan kegiatan yang dilakukan di dalam lokalisasi, WTS adalah pelaku adanya prostitusi di mana WTS adalah pekerjaan yang sangat dipandang ke bawah oleh masyarakat, banyak WTS yang dijebak serta terpaksa dan terjerumus serta mendesak melakukan pekerjaan tersebut, dengan kata lain, hak untuk merasakan kebebasan bertindak sesuai dengan kata hati telah hilang dan terampas. Perbuatan tersebut sudah sangat jelas telah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Masalah sosial ini merupakan masalah yang tetap ada selama masih ada nafsu seks yang lepas kendali dan hati nurani. Kondisi demikian mendorong masyarakat untuk mendirikan prostitusi-prostitusi atau kompleks pelacuran. Prostitusi merupakan suatu permasalahan yang sudah lama ada di Indonesia yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral yang melawan hukum. Pandangan masyarakat terhadap prostitusi telah memiliki ambiguitas tersendiri, yang tampak dari stigma-stigma negatif yang sangat kental terlanjur melekat pada prostitusi. Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyeberannya. Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan. Sedangkan prostitute adalah pelacur atau sundal dikenal pula dengan istilah WTS atau Wanita Tuna Susila. (Kartono & Kartini, 1992:177)

Prostitusi juga sangat berkenaan dengan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Negara Indonesia ini adalah negara hukum yang mempunyai dasar hukum Pancasila yang dikenal dan disegani di seluruh dunia. Maka sudah jelas ada lima dasar hukum yang harus dilaksanakan oleh warga Indonesia. Apabila ada warganya yang tidak mau mengikuti Pancasila jelas dia sudah tidak mau menjadi warga Indonesia. Berikut adalah butir-butir Pancasila yaitu Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa bahwa prostitusi dalam segi agama merupakan perbuatan yang melanggar aturan Tuhan, disebut juga perilaku zina.

Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab bahwa Pekerjaan WTS adalah pekerjaan yang sangat

dipandang ke bawah oleh masyarakat, banyak WTS yang dijebak serta terpaksa dan terjerumus serta mendesak melakukan pekerjaan tersebut, dengan kata lain, hak untuk merasakan kebebasan bertindak sesuai dengan kata hati telah hilang dan terampas.

Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa prostitusi adalah masalah yang berbagai aspek kehidupan, yaitu agama, politik, sosial dan ekonomi. Mayoritas para WTS terjerumus dalam prostitusi karena tekanan ekonomi. Ini menandakan bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan kemakmuran dan kesejahteraan

Penyebab timbulnya permasalahan sosial di kota Surabaya, salah satunya adalah WTS yang ditandai dengan banyaknya lokalisasi yang bertebaran di kota Surabaya baik legal maupun ilegal. Tempat lokalisasi merupakan sebuah pilihan bagi para laki-laki yang biasanya memiliki hasrat seksual yang begitu tinggi yang belum tersalurkan dengan baik.

Pada fenomena pekerja seks, terdapat beberapa unsur transaksi bisnis yang merupakan unsur dari mekanisme kerja, dimana sang subjek menggunakan ubuh sebagai komoditas untuk dijual dalam satuan harga yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak tanpa ada yang merasa merugikan dan dirugikan, kedua belah pihak merasa puas. (Abdullah, 2001:17)

Lokalisasi Dolly pada awalnya adalah tempat pemakaman warga Tionghoa pada masa penjajahan Belanda. Pemakaman ini dirubah oleh seorang Noni Belanda bernama Dolly van Der Mart pada tahun 1800-an sebagai tempat yang menyediakan beberapa gadis melayani kebutuhan biologis tentara Belanda. Tempat ini menyediakan para wanita penghibur yang didatangkan dari Semarang, Kudus, Pati, Purwodadi, Nganjuk, Surabaya dan Kalimantan.

Dimulai sekitar tahun 1966 daerah itu diserbu pendatang dengan menghancurkan bangunan-bangunan makam. Makam China itu tertutup bagi jenazah baru, dan kerangka lama harus dipindah ke ahli warisnya. Ini mengundang orang mendapatkan tanah bekas makam itu, baik dengan menggali kerangka jenazah, atau cukup meratakan saja. Setahun kemudian 1967, muncul seorang pelacur wanita bernama Dolly van Der Mart di kawasan makam Tionghoa tersebut. Dia kemudian menikah dengan pelaut Belanda, pendiri rumah pelacuran pertama di jalan yang sekarang bernama Kupang Gunung Timur 1. Dolly semakin berkembang pada tahun 1968 dan 1969. Wisma-wisma yang didirikan di sana semakin banyak. Adapun penyebarannya dimulai dari sisi jalan ke sebelah barat, lalu meluas ke timur hingga mencapai sebagian jalan jarak. (Purnomo & Siregar, 1982:20)

Dalam perkembangannya, Gang Dolly semakin dikenal masyarakat Luas. Tidak hanya prajurit Belanda yang berkunjung, warga pribumi dan saudagar yang berdagang di Surabaya juga ikut menikmati layanan wanita penjaja cinta tersebut. Peningkatan jumlah pengunjung berpengaruh kepada penambahan jumlah WTS dan memperluas rumah-rumah gang Dolly yang dialih fungsikan menjadi wisma prostitusi. Seiring dengan banyaknya jumlah pengunjung yang mencari kepuasan seks, jumlah rumah yang menyediakan perempuan pelayanan seks kemudian meningkat, pada tahap selanjutnya, wilayah ini menjadi kompleks lokalisasi yang dikenal dengan sebutan Dolly. (Purnomo & Siregar, 1982:26)

Jumlah rumah yang dialihfungsikan sebagai wisma pelacuran dan kafe minuman keras semakin banyak, menyebar di wilayah kupang gunung timur, putat jaya, hingga mencapai sebagian jalan jarak. Rumah penduduk yang dulunya dijadikan tempat hunian, bergeser menjadi rumah yang disewahkan untuk prostitusi. Saat ini, Dolly menjelma menjadi kekuatan dan sandaran hidup bagi penduduk disana. (Firdaus, 2013)

Lokalisasi adalah bentuk usaha mengumpulkan segala macam aktivitas atau kegiatan pelacuran dalam satu wadah, dan kemudian menjadi kebijakan melokalisasi pelacuran. (Soedjono D, 1973:122-124). Lokalisasi Dolly dapat dikatakan sebagai peraturan roda perekonomian dan melibatkan berbagai kalangan dari berbagai jenis usaha yang turut mencari rezeki. Keberadaan bisnis seks ini memberikan *multiplaying effect* dalam sektor perekonomian bagi sebagian masyarakat sudah menggantungkan kebutuhan hidup dari bisnis prostitusi tersebut.

Penutupan lokalisasi Dolly dapat menghadirkan suasana kota yang aman dan bersifat manusiawi meskipun Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya juga sangat menyadari akan banyaknya ancaman internal dan eksternal yang akan ditemui dalam proses penutupan. Mengingat rencana penutupan lokalisasi Dolly sudah sejak lama digadang-gadang namun dari walikota kota sebelumnya tidak menuai keberhasilan.

Untuk itu dalam proses penutupan lokalisasi Dolly pemerintah kota Surabaya yang berpedoman pada Dasar hukum dan peraturan daerah yang dimiliki oleh kota Surabaya dengan tujuan menata, memberdayakan, menertibkan para WTS. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah kota Surabaya dalam menutup lokalisasi Dolly adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang

Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Surabaya, Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2009 tentang Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat untuk Perbuatan Asusila serta pemikat untuk melakukan perbuatan asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang diperbarui kembali dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2013 tentang Pelarangan Menggunakan Bangunan Atau Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikat untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Selain dasar hukum undang-undang dan peraturan daerah dalam penutupan lokalisasi Dolly pemerintah kota juga mempunyai strategi dan keinginan yang sangat penting dalam penutupan lokalisasi Dolly yaitu menciptakan lingkungan yang aman, bersih dan bebas prostitusi. Serta mewujudkan Surabaya menjadi kota yang sehat dimana salah satu indikatornya adalah tatanan sosial yang sehat. Dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategik” dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kita, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi. (Nawawi, 2012:147)

Wali kota Surabaya yakin dalam melaksanakan penutupan lokalisasi Dolly yang menjadi sarang terbesar adanya praktik prostitusi. Penutupan Dolly yang dilakukan pemerintah kota Surabaya sangat berpengaruh bagi warga kota Surabaya, artinya masyarakat diinginkan untuk berubah sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat supaya dapat menghadirkan suasana kota yang lebih manusiawi sesuai norma- norma kemanusiaan yang berlaku. Jika dikaitkan maka penutupan lokalisasi Dolly menjadi jawaban yang sangat tepat dan sesuai dengan keinginan pemerintah kota Surabaya.

Akar masalah prostitusi ini amat kompleks dan multi dimensional, ada banyak sekali beberapa alasan yang melatarbelakangi masalah prostitusi ini. Tidak sekedar hanya karena persoalan moralitas, namun ada beberapa persoalan lain yang kiranya saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Prostitusi marak bisa karena faktor kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, konsumerisme atau perekonomian negara yang gagal.

Faktor permasalahan ekonomi sangat menyedihkan bagi masyarakat yang tidak memiliki ekonomi mapan, Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah

untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih pekerjaan pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak (Bachtiar & Purnomo, 2007:80-83). Oleh karena itu, pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan tidak bisa hanya dari pendekatan hukum dan moral semata-mata tapi juga pendekatan sosial, ekonomi, budaya dan perlindungan hak asasi manusia.

Mengenai beberapa pembahasan diatas, memicu keinginan untuk mengangkat masalah yang berhubungan dengan ”Strategi pemerintah kota Surabaya dalam menutup praktik prostitusi di Lokalisasi Dolly”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2013:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Menurut McMillan & Schumacher (2003) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan invest- gasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Whitney (dalam Nazir, 2005), data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpersi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena.

Dalam Penelitian ini dapat memfokuskan terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan Penelitian ini. Maka memfokuskan untuk meneliti tentang strategi pemerintah kota Surabaya dalam menutup praktik prostitusi di lokalisasi Dolly. Dimana Strategi yang dimaksudkan adalah Strategi yang mengikuti teori Fred R. David yakni Perumusan Strategi, Penerapan Strategi dan Penilaian Strategi. Pada ketiga strategi yang dirumuskan oleh Fred R. David yang membahas tentang perumusan strategi atau latar belakang strategi itu dilakukan kemudian penerapan strategi atau pelaksanaan strategi tersebut sampai pada titik penilaian strategi yakni hasil akhir yang sudah dilakukan

pemerintah kota Surabaya, sehingga sampai berhasil menutup praktik prostitusi di lokalisasi Dolly yang dikenal dengan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang dijadikan sebagai lokasi dalam mengumpulkan data. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni di kantor pemerintah kota Surabaya yang berada di Jl. Jimerto No. 25-27 Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60295 dan di lokalisasi Dolly di Jl. Kupang Gunung Timur 1. Lokasi ini dipilih karena Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Yang memiliki lokalisasi terbesar di Indonesia yang menjadikan salah satu kota yang terkenal pula dengan adanya lokalisasi. Selain itu gang Dolly sebagai salah satu lokalisasi yang sudah terkenal dan terbesar se Asia Tenggara.

Informan Penelitian adalah orang yang memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan rumusan masalah dalam suatu Penelitian. Berdasarkan Penelitian tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi informan Penelitian adalah orang-orang yang dianggap mengerti dan mampu menjawab rumusan masalah yang akan diteliti, sehingga tidak semua orang dapat dijadikan informan Penelitian. Informant dalam penelitian ini meliputi: 1) Agus Rosyid, SST., Kepala Sie rehabilitasi dan tuna sosial. 2) Gatot Subiyantoro, Humas Ideal MUI Jawa Timur.

Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data awalnya sedikit namun lama-lama menjadi besar. Snowball sampling merupakan teknik multi tahap, dimulai dari sedikit orang atau hanya informant tertentu (key informant) kemudian membesar sehubungan dengan pergerakan penelitian (Sugiyono, 2016:300). Informan yang dianggap memahami dan memiliki kriteria. Adapun beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh informan terhadap masalah Penelitian ini yakni Informan mengetahui kasus prostitusi terutama di lokalisasi Dolly. Dan yang bersedia menjadi informan untuk diwawancarai dalam masalah penutupan prostitusi di lokalisasi Dolly.

Sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah informasi atau materi yang didapat secara langsung berasal dari orang atau situasi yang tengah diteliti (Creswell, 2009:274). Adapun data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh berdasarkan *survey* dan wawancara langsung yang dilakukan dengan informan penelitian yang sudah di pilih oleh peneliti sesuai dengan kriteria yang diterapkan.

Data primer dapat diperoleh melalui beberapa cara, Salah satu cara yang digunakan dalam memperoleh data

adalah wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan fenomena permasalahan yang harus diteliti.

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari Penelitian ini adalah dokumen pernyataan Ibu Tri Rismaharini mengenai penutupan lokalisasi Dolly yang bersumber dari media social, buku-buku yang berkaitan dengan variable penelitian dan jurnal serta hasil Penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Wawancara dalam Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang Strategi dan kegiatan yang dilakukan pemerintah kota Surabaya dalam menutup praktik prostitusi di lokalisasi Dolly.

Teknik dokumentasi dapat menguatkan informasi dari informan dan melengkapi informasi penelitian atau menjadikan data lebih dapat dipercaya. Dokumen merupakan catatan penting peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa Teknik dokumentasi merupakan pelengkapan dari penggunaan Teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016:240). Dalam hal ini akan diperoleh sumber data berupa dokumen-dokumen tertulis dan gambar sebagai pendukung kelengkapan data menunjang penelitian ini.

Dokumentasi yang dicari selama Penelitian di pemerintah kota Surabaya adalah kegiatan-kegiatan yang terkait hubungannya dengan Strategi Pemerintah kota Surabaya dalam menutup praktik prostitusi di lokalisasi Dolly serta foto-foto kegiatan yang sudah direalisasikan, foto-foto terkait pembuktian hasil wawancara dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya, dan data-data terkait lainnya.

Penelitian ini dalam menguji keabsahan data menggunakan Triangulasi sumber yakni untuk menguji keabsahan data dilakukan setelah data terkumpul. Data yang telah terkumpul kemudian di cek dengan menarik kesimpulan dan meminta kesepakatan dari beberapa sumber. Dalam Penelitian ini hasil wawancara yang dilakukan pada informan Penelitian yang telah dianalisis akan ditarik kesimpulan dengan meminta kesepakatan dari masing-masing pemberi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Menutup Praktik Prostitusi di Lokalisasi Dolly

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemerintah kota Surabaya dalam menutup praktik prostitusi di lokalisasi Dolly. Pemerintah kota Surabaya juga mempunyai progam-progam kegiatan keagamaan serta pelatihan pelatihan yang ditujukan kepada para

WTS, mucikari dan warga terdampak akibat adanya penutupan lokalisasi Dolly dengan tujuan supaya mereka tidak bergantung lagi dengan lokalisasi tersebut. Maka dengan lokalisasi Dolly ditutup secara otomatis dapat mengalihkan pekerjaan WTS tersebut menjadi pekerjaan yang lebih baik dengan rehabilitasi. Proses pelaksanaan strategi terdiri dari beberapa tahap yakni :

Upaya Penutupan Lokalisasi Dolly

Upaya penutupan lokalisasi Dolly terbagi menjadi tiga kegiatan yang pertama melakukan deklarasi dukungan penutupan lokalisasi, deklarasi dukungan ini adalah kegiatan mengumpulkan stakeholder seperti paguyuban di Dolly, RT/RW setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat dan sejumlah pejabat pemerintah kota Surabaya supaya mendukung kebijakan pemerintah kota Surabaya menutup lokalisasi Dolly. Adapun tahap-tahap kegiatan dalam upaya penutupan lokalisasi Dolly yaitu sebagai berikut.

Deklarasi Dukungan

Kegiatan yang pertama adalah deklarasi dukungan Dolly dilaksanakan pada tanggal 27 Febuari 2014 bertempat di Gedung Bharawira Polrestabes Surabaya. Tujuan deklarasi yakni untuk mencari dukungan dan kerjasama untuk mencapai keberhasilan penutupan lokalisasi Dolly. Kemungkinan besar langkah penutupan yang digagas oleh wali kota Surabaya akan mendapat perlawanan warga penghuni lokalisasi. Akan tetapi Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya berpegang teguh tetap dengan kebijakan awal akan menutup lokalisasi Dolly. Seperti pidato Ibu Tri Rismaharini selaku Wali kota Surabaya saat deklarasi dukungan penutupan Dolly yang diliput <https://www.merdeka.com> pada tanggal 27 Febuari 2014:

“...saya diberi amanah untuk menjaga ini, menyelamatkan generasi muda dari prostitusi. Ini adalah tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semua. Untuk itu saya mengajak semua supaya ikut membantu menutup gang Dolly. Kita sudah menyiapkan semuanya dan siap membantu menutup lokalisasi sebelum puasa makanya kita adakan sosialisasi seperti ini...” (Sumber data sekunder 27 Febuari 2014)

Pemaparan ini diperkuat oleh Bapak Agus Rosyid selaku kepala sie rehabilitasi.

“...dalam penutupan ini kita saling bekerjasama, dalam membackup terkait dengan penutupan lokalisasi kalau tidak ada pengamanan yang maksimal siapa yang bisa pihak kepolisian dan pihak koramil, seperti itu. Jadi tujuannya semua itu memaksimalkan agar dalam kegiatan penutupan lokalisasi ini tidak menimbulkan permasalahan baik dari si objek yang mau di

tutup maupun lingkungan yang ada di sekitar situ, dampaknya di lingkungan situ lah kita kan khawatir bisa jadi ada gejolak disitu yang mengakibatkan adanya unjuk rasa dan adanya penolakan...” (Sumber data Primer 29 Agustus 2019)

Dari ungkapan Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya dan Bapak Agus Rosyid selaku kepala Sie rehabilitasi, dalam proses penutupan lokalisasi pemerintah kota Surabaya tidaklah sendiri. Banyak pihak yang membantu terutama dalam hal keamanan mulai dari pihak kepolisian bahkan koramil. Tujuannya yakni untuk mencari dukungan dan Kerjasama untuk mencapai keberhasilan penutupan lokalisasi Dolly. Besar kemungkinan Langkah penutupan yang digagas oleh wali kota Surabaya akan mendapatkan perlawanan dari warga penghuni lokalisasi.

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah kota Surabaya menyatakan sudah menyiapkan semua dan siap bertanggung jawab atas penutupan lokalisasi Dolly dan meminta dukungan dari berbagai pihak untuk bekerjasama demi keberhasilan penutupan lokalisasi yang ditargetkan sebelum 2014. Tujuan dikumpulkannya para *stakeholder* adalah supaya mendukung rencana penutupan lokalisasi dan mau bersinergi melakukan upaya penutupan dan kegiatan rehabilitasi pasca penutupan lokalisasi.

Pendataan Para WTS dan Warga Terdampak

Kegiatan yang kedua adalah pendataan para WTS dan warga terdampak. Pendataan ini dilakukan serentak dalam suatu kelompok dengan tujuan mengenal keberadaan kehidupan pribadi para WTS dan Pendataan warga yang terkena dampak penutupan lokalisasi. Pendataan ini dimulai pada tanggal 12 Maret 2014 dengan menerjunkan para pegawai-pegawai dinas wanita dan para satpol PP perempuan. Hal ini di ungkapkan oleh Ibu Tri Rismaharini selaku Wali kota Surabaya yang diliput oleh <https://katadata.co.id/berita> pada tanggal 12 Maret 2014:

“...pegawai saya, saya khususnya wanita, hampir setiap hari datang untuk melakukan survei. Mereka berbicara dengan WTS di Dolly dan menanyakan hal-hal seperti mengapa mereka melakukan itu, apakah karena masalah ekonom, sudah berapa lama mereka melakukannya, dan hal lain sebagainya. Dari hasil survei itulah kemudian baru saya memutuskan bahwa Dolly memang harus ditutup...” (Sumber data 12 Maret 2014)

Pemaparan bu Risma diperkuat dengan pernyataan Selaku Kepala Sie rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas pemerintah.

“...saat pendataan para WTS, mucikari dan warga terdampak pegawai bu Risma dibantu oleh lurah. Jadi lurah itu adalah kepanjangan

tangan dari wali kota di tingkat bawah kan jelas ada, dia harus mendukung kebijakan wali kota, apa yang dilakukan pihak lurah adalah pertama melakukan pendataan terkait dengan jumlah wts yang ada diwilayah nya, kedua mendata wisma-wisma yang ada diwilayahnya, yang ketiga mendata mucikari yang ada diwilayahnya, yang keempat mendata orang-orang yang terdampak...” (Sumber data sekunder 29 Agustus 2019)

Dari ungkapan Ibu Tri Rismaharini selaku Wali kota Surabaya dan Bapak Agus Rosyid, SST. Selaku Kepala sie rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas dapat disimpulkan bahwa Tujuan diterjakannya para bawahan bu Risma khususnya para pegawai-pegawai wanita adalah Serta dapat mempermudah memperoleh data jumlah para WTS, mucikari dan warga terdampak dan juga untuk mengetahui masalah-masalah para (WTS) hingga berani terjun ke dunia prostitusi.

Kebijakan penutupan lokalisasi bisa dilakukan oleh pemerintah daerah lainya asalkan memiliki data yang lengkap, Sehingga beban pihak pemerintah kota menjadi semakin ringan karena semua elemen telah membantu dan mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh bu Risma hal ini dilakukan untuk mempermudah penutupan. Data yang dikumpulkan jelas sehingga lebih mudah dalam penyelesaian solusinya.

Pembelian Wisma

Kegiatan ketiga adalah pembelian wisma, Menyatunya pemukiman warga dengan lokalisasi merupakan salah satu alasan Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya melakukan penutupan lokalisasi Dolly, selain itu bangunan atau aset yang dijadikan sebagai tempat praktik prostitusi Dolly adalah milik warga. Untuk itu solusi yang diterapkan pemerintah kota Surabaya adalah membeli bangunan tersebut. Bangunan yang berhasil dibeli pada tanggal 08 Juni 2014 oleh pemerintah kota Surabaya bernama wisma Barbara yang akan dialih fungsikan menjadi *Boardband Learning Center* (BLC), tempat belajar bagi warga dan anak-anak di gang Dolly.

Rencananya wisma yang dulunya sebagai hall dan kamar-kamar para WTS kini dialih fungsikan oleh pemerintah kota Surabaya menjadi tempat rehabilitasi pasca penutupan lokalisasi adapun alih fungsi tiap lantai seperti lantai dasar untuk area parkir supaya para pengunjung yang membawa kendaraan tidak mengganggu dan menghambat lalu lintas di gang Dolly maka bangunan yang dulunya sebagai *hall* para WTS sekarang dirubah menjadi area parkir yang dijaga langsung oleh petugas keamanan (satpam).

Lantai dua rencananya akan dirubah menjadi balai desa. Bangunan yang dulunya koridor kamar para WTS yang terdiri dari 25 kamar yang digunakan untuk praktik prostitusi para PSK dengan hidung belang sekarang

dirubah menjadi tempat balai pertemuan, bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk pelatihan keterampilan yang diberikan pihak pemerintah kota Surabaya juga untuk acara pertemuan seperti adanya kunjungan walikota, Gubernur dan acara lain yang bersifat musyawarah yang diadakan oleh masyarakat eks lokalisasi Dolly.

Lantai tiga yang dulunya adalah bangunan bekas kamar hunian para PSK yang terdiri dari 27 kamar akan dirubah menjadi taman bermain anak-anak dan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD). Meskipun mereka dari lingkungan prostitusi tetap nasib pendidikan mereka sangatlah penting. Hal ini diungkapkan oleh ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya yang diliput oleh <https://money.kompas.com> pada tanggal 11 maret 2014:

“...pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran rehabilitasi lokalisasi Dolly sekitar Rp 16 Miliar. Saat ini luasan tanah dan proses pembelian wisma yang dijual pemilik sedang diproses Pemkot Surabaya dan dirubah menjadi bangunan untuk rehabilitasi...” (Sumber data sekunder 11 Maret 2014)

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Agus Rosyid, SST. Selaku Kepala Sie rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas menyatakan

“...karena salah satu mucikari terbesar disitu bisa kita rangkul dia dengan rela hati mau menjual wismanya kepada kita seharga 9,6 M wisma yang paling besar itu barbara itu.. karena sudah masuk dikitalah akhirnya kan yang lain mikir, loh yang besar saja masuk ndek kita apalagi yang kecil...” (Sumber data primer 29 Agustus 2019)

Dari pemaparan Ibu Tri Rismaharini dan bapak Agus Rosyid, SST. Selaku Kepala sie rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas menjelaskan bahwa pihak pemerintah kota Surabaya telah membeli wisma yang paling besar, setelah pembelian wisma terbesar di Lokalisasi Dolly berhasil, wisma-wisma kecil yang kebanyakan dari mereka mengontrak kemudian juga gulung tikar. Wisma yang berhasil dibeli oleh pemerintah bernama wisma BARBARA wisma tersebut berhasil di beli oleh pemerintah kota seharga 9,6 M. Rencananya wisma ini akan disulap dan di alih fungsikan oleh pemerintah kota menjadi bangunan yang dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat serta anak – anak gang Dolly.

Berdasarkan paparan tersebut dapat kita ketahui bahwa strategi dengan membeli wisma terbesar di lokalisasi Dolly berhasil membuat wisma-wisma kecil disekitar lokalisasi Dolly menjadi lebih baik, juga dapat memberikan perkembangan kemajuan dalam memberdayakan para WTS, mucikari dan warga terdampak akibat adanya perencanaan penutupan lokalisasi.

Pelaksanaan Penutupan Lokalisasi

Kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam menyelesaikan masalah prostitusi khususnya di kota Surabaya adalah dengan cara menutup lokalisasi tersebut. penutupan Dolly bukanlah perkara yang sederhana, selama puluhan tahun lokalisasi tersebut berdiri dan belum ada yang mampu mengatasinya sampai Dolly terlanjur menjadi lahan penghidupan banyak orang. Pelaksanaan penutupan lokalisasi terbagi menjadi dua kegiatan yakni :

Deklarasi Penutupan

Kegiatan pertama adalah deklarasi penutupan dilaksanakan tepat di hari Rabu malam tanggal 18 Juni 2014 bertempat di gedung *Islamic Center* Dukuh Kupang Surabaya. Pemerintah kota Surabaya tetap menggelar deklarasi penutupan lokalisasi Dolly di tengah protes warga dan para pekerja seks Komersial. Wali kota Surabaya Ibu Tri Risma harini selaku wali kota Surabaya mengungkapkan rasa syukur karena akhirnya penutupan Dolly bisa terlaksana meskipun sempat mendapat tantangan dan protes dari sejumlah pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Tri Rismaharini selaku Wali kota Surabaya saat berpidato dalam acara deklarasi penutupan Dolly yang diakses pada tanggal 18 Juni 2014 <https://detikNews.com> menyatakan.

“...alhamdulillah saya lega, ke depan tinggal bagaimana membantu mewujudkan harapan masyarakat untuk bisa tetap sejahtera meskipun tempat mereka selama ini mencari nafkah ditutup...” (Sumber data sekunder 18 Juni 2014)

Pemaparan Ibu Tri Rismaharini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Rosyid, SST. Selaku Kepala Sie rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas.

“...saat Deklarasi penutupan Banyak yang hadir, jadi pembacaan deklarasi di atas panggung itu disaksikan oleh Menteri Sosial Salim Segaf Al-Fufri, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Unggung Cahyono, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga sempat berpidato menyampaikan rasa syukurnya lokalisasi Dolly resmi ditutup. Selain itu juga dihadiri oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan sekitar 100 warga...” (Sumber data primer 29 Agustus 2019)

Dari pemaparan Ibu Tri Rismaharini dan bapak Agus Rosyid, SST. Selaku Kepala sie rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya para elemen-elemen yang hadir dalam deklarasi penutupan lokalisasi Dolly membuktikan bahwa mereka sangat mendukung adanya kebijakan yang dilakukan oleh wali kota Surabaya. Beliau juga

sangat bersyukur akhirnya Dolly berhasil dan resmi di tutup pada 18 juni 2014.

Adapun isi deklarasi alih fungsi dan alih pekerjaan lokalisasi Dolly penutupan Dolly sebagai berikut: kami warga masyarakat kelurahan Putat Jaya gang Dolly kecamatan Sawahan Kota Surabaya berkeinginan supaya wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan menjadi wilayah yang bersih, sehat, aman, tertib, dan bebas dari lokalisasi prostitusi. Wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan menjadi wilayah yang bermartabat dengan membangun usaha-usaha perekonomian yang sesuai dengan tuntutan agama dan peraturan yang berlaku.

Pemerintah kota Surabaya memohon kepada aparat yang berwenang untuk menindak secara tegas para pelaku tindak kejahatan perdagangan orang, pelaku perbuatan asusila dan penggunaan bangunan untuk perbuatan maksiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan menjadi wilayah yang maju, aman, dan tertib dengan mengharapkan bimbingan dan perhatian dari aparat keamanan, pemerintah kota Surabaya, pemerintah Propinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat. Untuk itu penutupan lokalisasi juga menjadi tanggung jawab Bersama khususnya warga kota Surabaya untuk menjaga dan menyelamatkan generasi muda dari prostitusi. Bagi siapa saja yang berani Kembali ke wilayah lokalisasi Dolly untuk melakukan prostitusi akan diberikan hukuman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pemulangan Serta Pemberian Pesangon

Kegiatan yang kedua dalam pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly yakni pemulangan serta pemberian stimulan untuk WTS dan mucikari. Bagi para WTS dan mucikari yang tidak asli warga Surabaya mereka dipulangkan dan diberi pesangon oleh pemerintah kota Surabaya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya yang diliput oleh <https://www.tribunnews.com/regional> pada tanggal 15 April 2014 menyatakan.

“...Bantuan yang diberikan berupa dana Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp 3 juta, Rp 1,8 juta untuk jaminan hidup dengan rincian Rp 20 ribu per hari selama 90 hari dan Rp 250 ribu untuk transportasi mereka pulang ke kampung. Mereka membuat pernyataan tertulis tidak akan kembali lagi. Kalau nanti kembali lagi akan ditindak...” (Sumber data sekunder 15 April 2014)

Pernyataan ini selaras dengan pernyataan oleh bapak Agus Rosyid, SST. Selaku Kepala Sie rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas yang men menyatakan.

“...pemerintah kota lebih mengarahkan bagaimana warga Surabaya yang terdampak akibat lokalisasi itu. Mucikari belum tentu orang situ WTS belum tentu orang situ lah Lah WTSnya kembali ke asalnya. Kemudian mucikarinya? kamu itu loh yang membuat Surabaya kotor ya kembali lah ke asal kamu. Mereka juga diberikan pesangon supaya waktu pulang mereka bisa menggunakannya untuk modal usaha, kan dari pemkot juga sudah dibekali pelatihan ketrampilan...” (Sumber data primer 23 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil pemaparan Ibu Tri Rismaharini dengan Bapak Agus Rosyid, SST. Selaku Kepala Sie rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemulangan dan pemberian stimulan untuk WTS dan mucikari dikhususkan bagi mereka yang tidak asli warga Surabaya. Bagi WTS, mucikari dan warga terdampak asli Surabaya mereka mendapatkan penanganan rehabilitasi dari pemerintah kota Surabaya terhadap warga Surabaya.

Pelaksanaan pemberian pesangon dilaksanakan di halaman koramil kecamatan Sawahan kota Surabaya yang diresmikan dan ditanda tangani secara langsung oleh ibu Tri Rismaharini didalam surat pernyataan “bertanggung jawab atas penyerahan bantuan modal usaha ekonomi produktif, biaya hidup, dan transport pemulangan bagi eks WTS penghuni lokalisasi Dolly Surabaya”

Hal ini juga dibuktikan dengan tabel 1 rincian dana bantuan dari Pemerintah kota Surabaya bahwa Kementerian Sosial menyediakan dana kompensasi bagi 1.449 WTS di Dolly dan Jarak sebesar Rp 5.050.000,00 per orang. Adapun rincian anggaran pesangon untuk para WTS dan mucikari sebagai berikut.

Tabel 1. Rincian Dana Bantuan

Jenis Bantuan	Rp
Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	3.000.000
Pemulangan	250.000
Jaminan hidup dan transport	1.800.000
Jumlah per orang	5.050.000

Sumber : Data Primer 29 Agustus 2019

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa Pemulangan para WTS dan mucikari yang tidak asli Surabaya serta pemberian pesangon adalah bentuk kepedulian dan solusi dari pemerintah kota Surabaya supaya mereka para WTS dan mucikari tetap bisa bekerja di tempat asalnya dan tidak menggantungkan kehidupan di lokalisasi. Bagi WTS atau mucikari yang tidak Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa Pemulangan para WTS dan mucikari yang tidak asli Surabaya serta pemberian pesangon adalah bentuk kepedulian dan solusi dari pemerintah kota Surabaya

supaya mereka para WTS dan mucikari tetap bisa bekerja di tempat asalnya dan tidak menggantungkan kehidupan di lokalisasi. Bagi eks WTS dan mucikari yang tidak mengambil bantuan pesangon tersebut maka dana anggaran akan dikembalikan ke kementerian dan gubernur sesuai dengan kesepakatan.

Evaluasi Pasca Penutupan Lokalisasi

Adapun tahap evaluasi pasca penutupan eks lokalisasi Dolly ini terbagi menjadi dua kegiatan yang pertama adalah patroli keliling dan kegiatan yang kedua adalah program rehabilitasi di lingkungan eks lokalisasi Dolly.

Patroli Keliling

Sebagai masyarakat terdampak tentunya masih merasa sangat tidak rela dan tidak ikhlas lading rupiahnya selama berpuluh-puluh tahun ditutup begitu saja. Untuk itu pemerintah kota Surabaya melakukan pengawasan dan penertiban dengan cara patrol keliling yang dibantu oleh pihak dinas sosial, satpol pp, kepolisian dan koramil setempat yang dilaksanakan setelah Dolly resmi ditutup sampai eks lokalisasi benar benar tertib. Tujuannya untuk mencegah kembalinya para WTS dan mucikari di area eks lokalisasi Dolly.

Hal ini diungkapkan oleh bapak Agus Rosyid, SST. Selaku Kepala Sie rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas saat diwawancarai pada tanggal 24 Agustus 2019 selaku bahwa pasca penutupan Dolly pihak dari pemerintah kota Surabaya juga ikut memantau suasana gang Dolly pasca resmi di tutup :

“...pertama yang kita lakukan adalah melakukan patroli 24 jam di daerah lokalisasi dengan melibatkan satpol pp, polisi dan aparat-aparat lainnya yang punya kepentingan disitu, berkelanjutan sampai sekarang 24 jam patrol jadi keliling dengan menggunakan mobil keliling jadi sekarang ya jam segini kemudian nanti mungkin setengah jam lagi keliling lagi atau satu jam lagi keliling lagi, nah gitu, supaya apa, kalau ditentukan waktunya oh 1 jam sekali ya akan bisa di deteksi oleh mereka kan, oh disini ada patroli sek-sek tak *out* disek gitu...” (Sumber data primer 29 Agustus 2019)

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa dalam upaya pemeliharaan keamanan pasca penutupan lokalisasi Dolly, Selain melakukan *sosial control* pemerintah kota Surabaya juga membuat kebijakan bagi siapa saja yang berani kembali dan melakukan prostitusi akan di berikan sanksi tegas guna untuk menegakkan hukum sesuai dengan undang undang dan peraturan (PERDA) bahwa kepedulian mereka tidak terhenti saat proses penutupan saja tapi juga setelah pasca penutupan mereka juga masih memantau guna mencegah timbulnya prostitusi terselubung di lokalisasi Dolly.

Program Rehabilitasi di Lingkungan Eks Lokalisasi Dolly

Kegiatan yang kedua adalah program rehabilitasi di lingkungan eks lokalisasi Dolly yang dilaksanakan mulai bulan juli hingga september 2014. Program ini terbagi menjadi tiga kegiatan. Yakni pembinaan mental spiritual alih pekerjaan dan pelatihan keterampilan.

Pembinaan Mental Spiritual

Kegiatan pertama pembinaan mental spiritual, dalam program ini pemerintah kota Surabaya menggandeng Ikatan Da'i Area Lokalisasi Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan IDIAL -MUI Jawa Timur, secara posisinya dalam kelembagaan MUI Jawa Timur adalah berada dalam komisi dakwah khusus, yang khusus menangani masalah dakwa prostitusi, dan komisi ini sifatnya permanen ada di kelembagaan MUI Jawa Timur. Sehingga IDIAL- MUI Jawa Timur merupakan lembaga dakwah yang secara operasional menangani program pengentasan WTS serta menjadi wadah para da'i dalam naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang menjadi garda terdepan dalam pembebasan area lokalisasi di Jawa Timur.

Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Agus Rosyid selaku Kepala Sie rehabilitasi tuna sosial yang diwawancarai pada tanggal 29 Agustus 2019 :

“...jadi pihak yang punya kaitan di dalam penanganan lokalisasi itu juga ikut terlibat, sekarang pemkot kota Surabaya tidak mungkin memberikan pendekatan secara agama karena kita tidak punya kapasitas, siapa yang bisa? MUI...” (Sumber data primer 29 Agustus 2019)

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari bapak HM. Gatot Subiyantoro, saat di wawancarai pada tanggal 24 Oktober 2019 selaku Humas IDIAL- MUI Jawa timur yang menyatakan bahwa:

“...sebulan setelah resmi penutupan kita di ajak bu Risma ke Dolly karena Dolly sudah diresmikan ditutup, generasi mudahnya tumbuh kesadaran, kita saat itu punya proses membentuk komunitas yang bernama PERMATA saat itu, kepanjangannya PERsatuan Masjid dan Musollah kelurahan putat jaya kecamatan sawahan. Jadi itu muncul dari generasi muda, mereka kemarin sudah terbentuk ada 10 masjid dan 9 musollah. Ada kegiatan road show musollah juga. Tujuannya ya Kita bina itu terus kita pantau mbak.. jadi ada kordinator lapangan itu...” (Sumber data primer 24 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Rosyid selaku Kepala Sie rehabilitasi tuna sosial dengan bapak HM. Gatot Subiyantoro selaku Humas IDIAL- MUI Jawa timur dapat disimpulkan bahwa dalam rehabilitasi pembinaan mental pemerintah kota Surabaya bekerjasama dengan IDIAL- MUI Jawa timur

dengan membentuk komunitas PERMATA (Persatuan Masjid dan Musollah kelurahan putat jaya kecamatan sawahan). Tujuannya adalah untuk memantau dengan dampingan kordinator lapangan dari IDIAL-MUI Jawa Timur. Selain itu untuk merealisasikan IDIAL-MUI Jawa Timur dalam mengatasi masalah prostitusi Dolly dari sisi mental spritual melauai beberapa kegiatan seperti yang diungkapkan oleh bapak HM. Gatot Subiyantoro selaku Humas IDIAL- MUI Jawa timur yang menyatakan bahwa:

“...untuk melaksanakan kegiatan caranya itu mbak kita dekati dulu RTnya karena disana RT seperti wali kotakecil mbak, nanti Rtnya yang bagian pengumuman buat ngundang- ngundang kegiatan Rtnya bilang gini ya manut baru kita bisa ngajak mucikari, WTSnya pelaksanaan pengajian mucikari dan WTS dilaksanakan setiap jum’at sampai sekarang. Jubirnya juga beda beda mbak, kita mendatangkan dari koramil, dari orang PEMKOT juga dari dinas sosial bidang keagamaan macam-macam lah...” (Sumber data primer 24 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak HM. Gatot Subiyantoro selaku Humas IDIAL- MUI Jawa timur dapat disimpulkan dalam berdakwah saat penutupan Dolly beliau menggunakan metode dakwah persuasif yakni pendekatan terhadap ketua Rtnya (Rukun Tetangga) secara langsung dengan mengadakan pengajian rutin setiap hari jum’at yang mendatangkan juru bicara dari berbagai kalangan dengan tujuan menyadarkan para mucikari dan WTS supaya sadar bisa bangkit dari kerasnya kehidupan di lokalisasi.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan mental spiritual peran IDIAL- MUI Jawa timur dalam rehabilitasi pasca penutupan eks lokalisasi Dolly sangatlah besar juga peran pemimpin kelompok masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT) dalam pembinaan mental spiritual sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam masyarakat yang beragama, tentu sangatlah memiliki andil dalam menghadapi kehidupan sosial merupakan obat bagi setiap masalah dengan harapan para WTS, Mucikari dan warga terdampak eks lokalisasi Dolly dapat sadar dan kembali ke kehidupan yang tertata dan normal.

Alih Bidang Pekerjaan

Kegiatan kedua yakni alih pekerjaani, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat yang berada di lokalisasi Dolly adalah terkait pekerjaan atau pekerjaan warga yang sebelumnya mendapatkan penghasilan yang tinggi setelah terjadi penutupan tahun 2014 penghasilan mereka merosot, akhirnya dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah kota Surabaya dan pemerintah pusat

memberikan penyediaan lapangan kerja, dengan merekrut warga eks lokalisasi Dolly yang kehilangan lapangan pekerjaannya akibat terkena imbas penutupan lokalisasi pada 18 Juni 2014.

Hal ini sesuai dengan ungkapan Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya yang diliput oleh <https://tribunnews.com> yang menyatakan bahwa:

“...sudah ada puluhan warga terdampak yang diterima bekerja di beberapa Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Beberapa dari mereka kini bekerja sebagai tenaga keamanan dan juga driver...” (Sumber data sekunder 2014).

Ungkapan dari Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya didukung pernyataan dari Bapak Agus Rosyid selaku Kepala Sie rehabilitasi tuna sosial yang menyatakan bahwa:

“...jadi warga terdampak eks lokalisasi dulu ada yang diangkat oleh PEMKOT, yang dulunya sopir taksi sekarang diangkat jadi driver ambulans di dinas kesehatan, dulunya tukang parkir sekarang diangkat jadi satpam di dinas sosial. Karena dia direkrut oleh pemkot berarti dia menjadi tenaga kontrak, loh yang dimaksud dengan tenaga kontrak adalah bukan pegawai negeri jadi dia setiap tahun harus membuat kesepakatan kalau dia masih kepingin jadi tenaga kontrak ya mengajukan lagi permohonan perpanjangan tapi kita tidak pernah menolak permohonan dia selama dia tidak melanggar aturan maupun disiplin...” (Sumber data primer 29 Agustus 2019).

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya dengan Bapak Agus Rosyid selaku Kepala sie rehabilitasi tuna sosial dapat disimpulkan bahwa dalam rehabilitasi melalui alih pekerjaan Pemerintah kota Surabaya merekrut para WTS, mucikari dan warga terdampak eks lokalisasi Dolly untuk para warga yang kehilangan lapangan pekerjaannya. Hal tersebut adalah bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah kota Surabaya sekaligus mencari jalan keluar membantu kelangsungan ekonomi dalam mengatasi dampak penutupan lokalisasi Dolly.

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam alih pekerjaan Pemerintah kota Surabaya sangatlah peduli terhadap nasib WTS, Mucikari dan warga terdampak eks lokalisasi Dolly yang kehilangan lapangan pekerjaannya akibat terkena imbas penutupan lokalisasi Dolly. Mereka akan ditempatkan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diantaranya satpol PP, Linmas, Dinas kesehatan, Dinas sosial dan beberapa SKPD lainnya. Tujuan semata mata yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah supaya mereka tidak kembali ke dunia hitam dan dapat penghasilan

yang halal walaupun tidak sebanyak saat mengais rezeki di lokalisasi.

Pelatihan Keterampilan

Kegiatan yang ketiga adalah pelatihan keterampilan, keberadaan lokalisasi dimanapun tempatnya, pasti akan selalu menjadi ladang usaha bagi warga sekitar lokalisasi maupun warga pendatang, hal tersebut terjadi juga di setiap lokalisasi yang ada di Surabaya, terlebih lagi dengan Lokalisasi Dolly yang selalu digadag-gadag sebagai lokalisasi terbesar dan tersohor di Indonesia se- Asia.

Maka dari itu banyak warga sekitar yang menggantungkan mata pencahariannya dengan bekerja maupun berdagang, ataupun aktifitas lain yang digunakan untuk mencari nafkah di lokalisasi Dolly. Bu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya juga memikirkan solusi untuk warga setelah lokalisasi ditutup. Bukan hanya solusi tempat tinggal saja tapi juga solusi ekonomi. Jadi solusi yang dimaksud disini adalah penyelesaian agar mereka yang terdampak tetap bisa bekerja dan tidak menggantungkan kehidupan di lokalisasi.

Untuk itu beliau berusaha mengangkat harkat dan martabat khususnya kaum perempuan dengan memberdayakan sesuai kemampuan mereka masing-masing dengan memberikan pelatihan ketrampilan. Pelatihan ini dibuka di pendopo kecamatan Sawahan pada tanggal 10 September 2014. Tujuannya diberikan pelatihan berguna untuk memberikan bekal setiap pekerja seks yang akan beralih pekerjaan.

Hal ini sesuai dengan ungkapan Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya yang diliput oleh <https://www.republika.com> pada tanggal 10 September 2014 :

“...rehabilitasi yang juga dilakukan berupa pemberian latihan keterampilan seperti menjahit dan beberapa keahlian lain. Sehingga, ketika sudah tidak lagi menjadi WTS, mantan WTS Dolly bisa hidup dari ketrampilan yang dimiliki...” (Sumber data sekunder 10 September 2019)

Pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Rosyid selaku Kepala sie rehabilitasi tuna sosial yang menyatakan bahwa:

“...kegiatan pelatihan bagi warga terdampak ini adalah komitmen ibu wali kota Surabaya untuk menyejahterakan warga eks lokalisasi Dolly. pelatihannya gratis dan macam- macam ada menjahit, membuat, ada juga yang pengen jualan gorengan ya kita kasih pelatihan kuliner. Makanya kami ikut peduli dengan ibu- ibu dan warga terdampak penutupan Dolly. Selain

untuk rehabilitasi pelatihan kewirausahaan ini juga bertujuan supaya mereka mendapatkan penghasilan yang halal untuk kehidupan dan gak kembali lagi ke dunia prostitusi...” (Sumber data primer 29 Agustus 2019)

Pernyataan dari Ibu Tri Rismaharini dengan Bapak Agus Rosyid selaku Kepala sie rehabilitasi tuna sosial dapat disimpulkan bahwa dalam menyejahterakan warganya, wali kota Surabaya memberikan berbagai pelatihan keterampilan bagi para warga, mucikari dan WTS yang terdampak penutupan lokalisasi Dolly. Pelatihan yang diberikan pemerintah kota Surabaya bersifat gratis guna untuk meningkatkan *skill* dan kemandirian mereka.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikan masalah prostitusi Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya tidak sekedar menutup lokalisasi, melainkan juga memikirkan nasib perekonomian warga pasca lokalisasi Dolly ditutup dengan mengembangkan *skill* mereka.

Ketegasan dan prinsip wali kota Surabaya yakni ingin mengajak warganya untuk mencari rizki halal tanpa harus menjual tubuhnya ditempat lokalisasi dengan memberikan pelatihan yang bertujuan mendongkrak masalah perekonomian. Pelatihan itu berupa pemberian latihan ketrampilan seperti menjahit, membuat dan beberapa keahlian lain. Sehingga, ketika sudah tidak lagi menjadi WTS, mantan WTS Dolly bisa hidup dari keterampilan yang dimiliki.

Kendala yang dihadapi

Pelaksanaan penutupan Dolly sudah dilaksanakan dan diresmikan namun dalam proses penutupan tentunya menuai banyak tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak masyarakat yang terkena dampak penutupannya. Selama proses penutupan pemerintah kota juga mengalami berbagai macam kendala, namun berbagai macam pihak mulai dari organisasi masyarakat dan lainnya ikut serta membantu dan mendukung keberhasilan penutupan lokalisasi Dolly tersebut dikarenakan sebagian masyarakat masih merasa tidak rela dan tidak ikhlas ladang rupiahnya selama berapuluh puluh tahun ditutup begitu saja, tempat mencari nafkah untuk anak dan keluarga di rumah yang selama ini mereka banggakan kini harus ditutup oleh pemerintah kota Surabaya. berikut kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kota selama proses penutupan Dolly:

Ancaman Wali Kota Surabaya dibunuh

Keputusan wali kota Surabaya dalam menutup kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara banyak mengundang kontroversi karena menyangkut sumber penghidupan orang banyak. Keputusan penutupan Dolly

tidak semena-mena karena kepentingan pribadi maupun kelompok. Keputusan penutupan berpacu pada peraturan daerah yang melarang menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila.

Meski mendapat ancaman dan banyaknya teror Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya tetap akan menutup lokalisasi Dolly. seperti ungkapan beliau yang diliput <https://www.solopos.com> pada tanggal 05 Mei 2014 :

“...ya tidak apa-apa kalau ada perlawanan. Teman teman juga tahu waktu di Sememi dia juga dilawan. Namun bagaimana lagi ini kan bukan untuk saya. Saya ingin menyelamatkan anak- anak yang tinggal disana. Selain saya yang mengajukan bantuan ke kami itu juga banyak yang diteror, ada yang mau ngancam membunuh. Tolong dibantu untuk memahami, karena ini bukan perkara mudah, kasihan warga yang mau berubah...” (Sumber data sekunder 5 Mei 2014)

Pemaparan yang telah disampaikan Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya juga sebanding dengan hasil wawancara peneliti dengan baak Agus Rosyid selaku kepala sie rehabilitasi yang menyatakan bahwa:

“...banyak sekali mbak rintangannya bu Risma selain diancam dibunuh itu berbagai pihak sudah mengetahui, juga keluarganya mbak ikut terancam lah rumahnya saja dulu sering dimasuki ular kiriman kok. Entah dari oknum siapa yang melakukan seperti itu yang jelas Dolly akan tetap ditutup gak bisa. Untuk mengatasi ancaman itu Kita bekerjasama kan tidak mungkin kita bisa membackup terkait dengan penutupan lokalisasi kalau tidak ada pengamanan yang maksimal siapa yang bisa? pihak kepolisian dan pihak koramil, seperti itu jadi tujuannya semua itu memaksimalkan agar dalam kegiatan lokalisasi ini tidak menimbulkan permasalahan baik dari si objek yang mau di tutup maupun lingkungan yang ada di sekitar situ, dampaknya di lingkungan situ lah kita kan khawatir bisa jadi ada gejala disitu yang mengakibatkan adanya unjuk rasa, adanya anu penolakan ya seperti itu...”. (Sumber data primer 29 Agustus 2019)

Pernyataan dari Ibu Tri Rismaharini dengan Bapak Agus Rosyid selaku Kepala sie rehabilitasi tuna sosial dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi saat proses penutupan Dolly salah satunya adalah diancam untuk dibunuh, namun ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya tetap kukuh menutup lokalisasi Dolly. Untuk mengatasi ancaman tersebut pemerintah kota Surabaya bekerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak koramil untuk membackup masalah keamanan. Tujuannya supaya saat penutupan lokalisasi Dolly tidak sampai menimbulkan permasalahan dari berbagai pihak.

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa gang Dolly adalah kehidupan ekonomi yang demikian besar. Banyak uang mengalir di sana, ribuan bahkan mungkin ratusan ribu orang bergantung di lokalisasi Dolly. Dapat kita fikirkan bila nafkah seseorang terancam maka tidak mungkin seorang berbuat nekat untuk berbuat yang diluar dugaan seperti membunuh atau melukai seseorang yang dianggap mengancam kehidupan ekonominya.

Gang Dolly adalah sumber ekonomi tidak halal pasti pelakunya juga sebagian besar adalah orang yang tidak terlalu mentaati etika dan hukum masyarakat. maka wajarlah bila Ibu Tri Rismaharini akan menerima ancaman pembunuhan dari para preman atau pelaku ekonomi yang tergusur akibat adanya penutupan lokalisasi Dolly. Tujuannya supaya mereka setelah Dolly resmi ditutup tetap bisa mendapatkan penghasilan tanpa kembali ke dunia prostitusi.

Banyaknya wisma milik warga pendatang

Salah satu strategi yang diterapkan dalam menutup lokalisasi Dolly adalah dengan membeli wisma- wisma yang berada di area lokalisasi. Namun dalam proses pembelian wisma terganjal soal kepemilikan wisma, sebagian besar wisma di lokalisasi Dolly dimiliki oleh warga dari luar kawasan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya saat sosialisasi penutupan Dolly di gedung Bhawrawira Polrestabes Surabaya yang diliput oleh <https://www.solopos.com> pada tanggal 27 Februari 2014 :

“...ingin mereka seperti daerah lain yang sadar pentingnya penutupan lokalisasi, tapi mungkin ada orang pendatang atau orang luar yang punya wisma di sana, ini lah yang membuat Dolly semakin panjang karena warga asli di sana malah ingin ditutup...” (Sumber data sekunder 27 Februari 2014)

Pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Tri Rismaharini selaku wali kota Surabaya juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Rosyid selaku Kepala sie rehabilitasi tuna social yang menyatakan bahwa:

“...masalah pembelian wisma awalnya sulit, kebanyakan bukan orang asli Dolly mbak tapi malah pendatang, tapi karna pemilik wisma terbesar bisa pemiliknya bisa kita rangkul dan wismanya mau dibeli seharga 9,6M jadi ya Alhamdulillah wisma yang kecil- kecil itu lama kelamaan gulung tikar dan mau kalok wismanya dibeli sama pemkot lah wisma terbesar yang jadi pusatnya aja tutup otomatis wisma wisma yang kecil kan juga gak laku kalok mau oprasi...” (Sumber data primer 29 Agustus 2019)

Pernyataan dari Ibu Tri Rismaharini dengan Bapak Agus Rosyid selaku Kepala sie rehabilitasi tuna sosial

dapat disimpulkan bahwa dalam penutupan Dolly salah satu kendalanya ada di proses pembelian wisma, dimana wisma wisma yang berada di Dolly kebanyakan adalah milik warga pendatang dan warga dari luar Dolly.

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa hambatan dalam penutupan lokalisasi Dolly adalah pembelian wisma dimana wisma di gang Dolly yang pemiliknya kebanyakan dari luar kawasan Dolly dan tidak semua pemilik wisma mau menjual wismanya kepada pihak pemerintah kota Surabaya, hal itulah yang menjadi salah satu penghambat penutupan lokalisasi Dolly. Akan tetapi dengan adanya hambatan tersebut pihak pemerintah kota Surabaya tetap bisa mengatasi dengan menerapkan sistem sewa atau kontrak bagi wisma yang tidak dijual oleh pemiliknya dengan dialihfungsikan sebagai tempat PKL dan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pemerintah kota dalam menutup praktik prostitusi di lokalisasi Dolly terdiri dari beberapa kegiatan yang dibagi menjadi tiga tahap yakni perencanaan penutupan lokalisasi Dolly, pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly, dan evaluasi pasca penutupan lokalisasi. Pada ketiga tahap tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yakni pada tahap yang pertama yakni perencanaan penutupan lokalisasi terbagi menjadi empat kegiatan seperti Deklarasi Dukungan penutupan, pendataan para WTS, sosialisasi penutupan, dan pembelian wisma.

Kemudian untuk tahap kedua pelaksanaan penutupan terbagi menjadi dua kegiatan yakni deklarasi penutupan dan pemulangan serta pembagian pesangon bagi WTS dan mucikari. Sedangkan pada tahap terakhir terbagi menjadi tiga kegiatan diantaranya patroli keliling, sosialisasi pasca penutupan, dan program rehabilitasi di lingkungan eks lokalisasi Dolly, untuk program rehabilitasi ini terbagi menjadi tiga kegiatan lagi yakni pembinaan mental, pelatihan ketrampilan dan alih pekerjaan Mengingat tahap pasca penutupan lokalisasi ini sangat penting guna mencegah kembalinya para WTS dan mucikari ke dunia hitam dan dapat penghasilan yang halal.

Strategi pemerintah kota Surabaya dalam menutup praktik prostitusi di lokalisasi Dolly dibagi menjadi tiga tahap yakni upaya penutupan lokalisasi Dolly, pelaksanaan penutupan lokalisasi dan upaya pasca penutupan lokalisasi. Hal ini sesuai dengan teori strategi Fred R David yang juga terbagi menjadi tiga tahap yakni perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi.

Dalam Penelitian ini, manajemen strategi merupakan kegiatan yang dirumuskan, diimplementasikan, serta dievaluasi oleh pemerintah kota Surabaya untuk

mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini tujuan yang dicapai adalah penutupan prostitusi dilokalisasi Dolly.

Mengacu pada teori teori strategi Fred R David tahap pertama adalah perumusan strategi yakni pencarian strategi-strategi alternative, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Dalam teori perumusan strategi ini langkah Pemerintah kota Surabaya adalah pelaksanaan tahap pertama yakni upaya penutupan lokalisasi yang terbagi menjadi tiga kegiatan yang pertama melakukan deklarasi dukungan penutupan lokalisasi, deklarasi dukungan ini adalah kegiatan mengumpulkan *Stakeholder* seperti para paguyuban di Dolly, RT/RW setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat dan sejumlah pejabat Pemkot Surabaya supaya mendukung kebijakan pemerintah kota Surabaya menutup lokalisasi Dolly.

Kemudian kegiatan yang kedua adalah pendataan para WTS dengan tujuan untuk mengetahui jumlah para WTS dan masalah-masalah para WTS hingga berani terjun ke dunia prostitusi, sehingga para pemerintah kota Surabaya lebih mudah mencari solusi penyelesaiannya.

Kegiatan yang ketiga adalah pembelian wisma yang bertujuan supaya praktik prostitusi di lokalisasi dolly gulung tikar, pemerintah kota Surabaya sedikit demi sedikit menghilangkannya dengan cara membeli wisma terbesar yang berada di Dolly bernama wisma barbara, otomatis jika wisma terbesar saja tutup maka wisma-wisma kecil yang berada disekitar wisma Barbara mereka akan ikut gulung tikar. Rencananya wisma yang dibeli oleh pemerintah kota Surabaya akan disulap dan dialih fungsikan menjadi bangunan yang dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat serta anak-anak gang Dolly.

Tahap kedua teori strategi Fred R David adalah penerapan strategi yakni pelaksanaan kebijakan suatu perusahaan, jika dikaitkan dengan penelitian ini kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam menyelesaikan masalah prostitusi khususnya di kota Surabaya adalah dengan cara menutup lokalisasi yakni lokalisasi Dolly. Dalam teori penerapan strategi ini langkah Pemerintah kota Surabaya adalah pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly yang dibagi menjadi dua kegiatan yakni kegiatan pertama adalah pelaksanaan deklarasi penutupan, jika perumusan strategi berhasil dilaksanakan maka secara otomatis penerapan strategi dapat dilaksanakan, deklarasi penutupan ini adalah acara peresmian penutupan lokalisasi Dolly yang berhasil ditutup oleh wali kota Surabaya pada tanggal 18 Juni 2014.

Kemudian setelah resmi dan berhasil ditutup kegiatan kedua dalam penerapan strategi yakni pemulangan dan pemberian pesangon bagi para WTS

dan mucikari, dimana mereka sebelumnya sudah di bekali pelatihan dan pesangon yang berikan Pemkot dapat mereka gunakan sebagai modal usaha di tempat asal mereka.

Tahap terakhir teori strategi Fred R David adalah penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi, penilaian atau evaluasi strategi untuk mengatasi adanya ancaman karena berbagai faktor eksternal dan internal. Pemerintah kota Surabaya memiliki beberapa kegiatan pada tahap pasca penutupan lokalisasi Dolly, hal ini bertujuan untuk mengatasi dampak akibat adanya penutupan eks lokalisasi Dolly selain itu supaya lokalisasi yang sudah resmi ditutup pada tanggal 18 Juni 2014 tidak akan kembali lagi dipergunakan sebagai tempat praktik prostitusi oleh oknum- oknum yang menentang adanya kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah kota Surabaya.

Adapun tahap evaluasi pasca penutupan eks lokalisasi Dolly ini terbagi menjadi dua kegiatan yang pertama adalah patroli keliling dan kegiatan yang kedua adalah program rehabilitasi di lingkungan eks lokalisasi Dolly, program ini terbagi menjadi tiga kegiatan. pertama adalah pembinaan mental spritual. pembinaan mental spritual ini pemerintah kota Surabaya menggandeng Ikatan Da'i Area Lokalisasi Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan IDIAL - MUI Jawa Timur.

Untuk kegiatan yang diberikan untuk pembinaan ini IDIAL-MUI Jawa timur dalam berdakwah saat penutupan Dolly dengan menggunakan metode dakwah persuasif yakni pendekatan terhadap RT-nya (Rukun Tetangga) secara langsung dengan mengadakan pengajian rutin setiap hari jum'at yang mendatangkan juru bicara dari berbagai kalangan dengan tujuan menyadarkan para mucikari dan WTS supaya sadar bisa bangkit dari kerasnya kehidupan di lokalisasi.

Kegiatan yang kedua yakni alih pekerjaan yakni kegiatan rehabilitasi melalui penyediaan lapangan kerja dengan merekrut warga eks lokalisasi Dolly yang kehilangan lapangan pekerjaannya akibat terkena imbas penutupan lokalisasi pada 18 Juni 2014. Mereka akan ditempatkan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah diantaranya satpol PP, Linmas, Dinas kesehatan, dinas sosial dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Tujuan semata mata yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah supaya mereka tidak kembali ke dunia hitam dan dapat penghasilan yang halal walaupun tidak sebanyak saat mengais rezeki di lokalisasi.

Kegiatan yang ketiga yakni kegiatan rehabilitasi melalui pelatihan keterampilan untuk warga terdampak penutupan Dolly. ada berbagai macam pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, pelatihan itu

berupa pemberian latihan ketrampilan seperti pelatihan membuat makanan, membuat, menjahit dan beberapa keahlian lain. Sehingga, ketika sudah tidak lagi menjadi WTS dan mucikari mantan WTS dan WTS Dolly bisa hidup maka masalah perekonomian di eks lokalisasi Dolly.

Selama proses penutupan pemerintah kota juga mengalami berbagai macam kendala selama proses penutupan lokalisasi Dolly. kendala yang pertama adalah adanya ancaman wali kota Surabaya dibunuh karena gang Dolly adalah sumber ekonomi tidak halal yang pasti pelakunya juga sebagian besar adalah orang yang tidak terlalu mentaati etika dan hukum masyarakat. Maka wajarlah bila Ibu Risma akan menerima ancaman pembunuhan dari para preman atau pelaku ekonomi yang tergusur akibat adanya penutupan lokalisasi Dolly.

Kendala kedua yang dialami oleh pemerintah kota Surabaya dalam menjalankan strategi menutup lokalisasi Dolly adalah banyaknya wisma milik warga pendatang dari luar Dolly. Untuk dalam mengatasi kendala tersebut pihak pemerintah kota menerapkan sewa kontrak untuk wisma yang tidak dijual oleh pemiliknya yang nantinya wisma akan dijadikan tempat usaha dan sentra pedagang kaki lima oleh pihak pemerintah Kota Surabaya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil yang berjudul "Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Menutup Lokalisasi Dolly" terbagi menjadi tiga program strategi yakni: (1) perencanaan penutupan yang terdiri dari kegiatan pertama deklarasi dukungan penutupan. Kegiatan mengumpulkan Stakeholder terkait rencana penutupan lokalisasi Dolly dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2014 di Gedung Bharawira Sasana Polrestabes Surabaya. Adapun Sasaran dari kegiatan ini adalah para WTS, Mucikari, dan Masyarakat Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagian warga lokalisasi Dolly. (2) Pendataan Warga terdampak dan PSK, pendataan ini dimulai pada tanggal 12 Maret 2014 dengan menerjunkan para pegawai- pegawai dinas wanita dan para satpol PP perempuan; (3) Pembelian wisma. Wisma ini berhasil di beli pada tanggal 08 Juni 2014 oleh pemerintah kota Surabaya bernama wisma Barbara.

Adapun program strategi pemerintah yang kedua pelaksanaan penutupan lokalisasi terdiri dari dua kegiatan yaitu (1) Deklarasi penutupan dilaksanakan resmi pada tanggal 18 Juni 2014 di gedung *Islamic Center* Dukuh Kupang Surabaya dengan membacakan perjanjian isi deklarasi yang dibacakan oleh lebih 100 warga dari kelurahan yang menjadi tempat lokalisasi. (2) Pemulangan dan pemberian pesangon. (3) Evaluasi

pasca penutupan lokalisasi terdiri dari dua kegiatan yakni Patroli keliling dan rehabilitasi

Adapun kendala yang dihadapi selama proses penutupan lokalisasi Dolly yakni (1) adanya ancaman wali kota Surabaya dibunuh dan proses saat pembelian wisma; (2) Pembelian wisma karena wisma yang berada di lokalisasi Dolly kebanyakan pemiliknya adalah warga pendatang yang tidak mau menjual wismanya.

Saran

Bagi masyarakat eks lokalisasi Dolly dengan adanya program strategi menutup tempat lokalisasi oleh pemerintah kota Surabaya tujuannya adalah murni untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan beberapa individu saja, oleh karena itu bagi warga masyarakat eks lokalisasi Dolly untuk mampu bangkit dari keterpurukan selama ini, melupakan segala yang buruk di masa lalu dan mulai bersama bergotong royong kembali membangun pribadi yang mampu menemukan sumber ekonomi baru yang suatu saat bisa jadi usaha bersama dan tentunya tidak kembali ke jurang kelam terdahulu.

Untuk pemerintah Kota Surabaya sendiri supaya selalu memantau dan membimbing segenap warga eks lokalisasi untuk mampu bangkit dari masa kelam. Pemerintah kota Surabaya membimbing ke arah yang baik dan selalu mendukung segala kegiatan positif yang dihasilkan oleh warga eks lokalisasi agar tingkat percaya diri mereka semakin naik, mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan yang terakhir pemerintah bisa selalu mempromosikan serta membantu memasarkan selalu produk kerajinan yang dihasilkan oleh warga eks lokalisasi Dolly.

DAFTAR PUSTAKA

- Amru, A., 2014. Warga eks lokalisasi Dolly jarak mulai dilirik pemkot. [Online] Available at: <https://surabaya.tribunnews.com> [diakses tanggal 10 Maret 2020].
- Andriansyah, M., 2014. Risma minta bantuan warga Surabaya tutup Dolly. [Online] Available at: <https://www.merdeka.com> [diakses tanggal 10 Maret 2020].
- Abdullah, I., 2001. *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Trawang Press.
- Creswell, J., 2009. *Research Design*. Terjemahan oleh Acmad Fawaid. 2010. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- David, Fred. R., 2010. *Manajemen Strategis, Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Faizal, A., 2014. Ini alasan Risma ngotot tutup lokalisasi prostitusi. [Online] Available at: <https://money.kompas.com> [diakses tanggal 10 Maret 2020].
- Firdaus, F. R., 2013. Eks lokalisasi Dolly sampai terbesar di Asia Tenggara. [Online] Available at: <http://www.merdeka.com/peristiwa/sejarah-gang-dolly-sampai-terbesar-di-asia-tenggara.html>. [diakses tanggal 11 Maret 2020].
- Ismail, N., 2008. *Manajemen Strategis Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karsidi, R., 2005. *Sosiologi Pendidikan*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS..
- Kartono & Kartini, 1992. *Pathologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..
- Peni, W., 2014. *Penutupan Dolly Risma tak gentar tutup Dolly meski banyak teror*. [Online] Available at: <https://solopos.com> [diakses tanggal 10 Maret 2020].
- Purnomo, T. & Siregar, A., 1982. *Membedah dunia pelacuran Surabaya kasus kompleks pelacuran Dolly*. Surabaya-Yogyakarta: PT. Grafiti Pres.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang *Pelarangan Menggunakan Bangunan atau Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya*.
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat untuk Perbuatan Asusila*.
- Reno, B. & Edy, P., 2007. *Bisnis Prostitusi Pekerjaan yang Menguntungkan*. Yogyakarta: Pinus.
- Soejono, D., 1977. *Pelacuran ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- W, Creswell John. 2013. *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Yulis, S., 2014. Mucikari di Dolly akan diberi pesangon wali kota Risma 5 juta perorang. [Online] Available at: <https://www.tribunnews.com/regional> [diakses tanggal 10 Maret 2020].